

**ALASAN INDONESIA BERGABUNG MENJADI SALAH SATU NEGARA ANGGOTA
DI FORUM KERJASAMA INTERNASIONAL NEGARA BERKEMBANG MIKTA (
MEKSIKO,INDONESIA,KOREA ,TURKI DAN AUSTRALIA).**

***THE REASONS OF INDONESIA JOIN ONE OF THE MEMBERS IN THE MIKTA
DEVELOPMENT INTERNATIONAL COOPERATION FORUM (MEXICO, INDONESIA,
KOREA, TURKEY AND AUSTRALIA).***

ANDREKO FERNANDO PUTRA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: andreko.fernando.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK

This Research is trying to explain about why Indonesia joined as one of the member countries in the international cooperation forum for developing countries of MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey and Australia). MIKTA itself is a Forum or Group of international cooperation in developing countries that serves to discuss issues that occur in the international world and the potential for international cooperation. This study uses the theory of international cooperation and the Theory of Foreign Policy and this research also applies qualitative methods and the data obtained comes from books, journals, documents, articles, internet articles and

other sources related to this research. Indonesia itself joined MIKTA in 2013 along with other MIKTA member countries during the formation of MIKTA on September 25, 2013, on the sidelines of the 67th UN General Assembly. The joining of Indonesia in MIKTA certainly brings some national interests that Indonesia wants to achieve.

Keywords: Indonesia, MIKTA, International cooperation theory, Foreign Policy Theory

Pendahuluan

. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan negara terpadat kelima di dunia, memiliki total 17.508 pulau, dimana sekitar 6.000 dihuni. Dan Indonesia memiliki jumlah penduduk berjumlah 264 juta jiwa berdasarkan data yang dirilis oleh PBB . dan jumlah penduduk itu menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia saat ini. (Recipe, 2015)

Indonesia Sebagai Negara berkembang yang sedang berusaha menjadi Negara maju tentunya memiliki masalah dan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Indonesia ,dan berkembangnya isu-isu internasional, yang semakin dinamis memberikan dampak pada keputusan pengambilan kebijakan luar negeri setiap negara. Isu-isu yang berkembang pada era sekarang tidak hanya berfokus pada isu tradisional, seperti konflik ideologis dan perang, tetapi kini meliputi isu non-internasional. Isu non-tradisional mulai muncul pada tahun akhir 1990an, seperti terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, prolifgerasi senjata pemusnah massal, demokrasi, sosial budaya, ekonomi, dan lainnya yang mengancam keamanan, stabilitas nasional dan internasional. Hal ini terjadi karena proses interaksi tidak hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi munculnya aktor non-negara. dll. Termasuk Indonesia.

Intergrasi sebuah kerjasama multilateral sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di dunia ini .Salah Satu bentuk Intergrasi nya ialah Pada 25 September 2013, di sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-67, para menteri luar negeri dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia bertemu untuk membahas pembentukan sebuah grup konsultatif informal yang kemudian disebut sebagai MIKTA.

Indonesia sendiri, mengembangkan platform internasional baru terkesan tidak sesuai dengan visi "diplomasi untuk rakyat" yang menghendaki bahwa kebijakan luar negeri dapat memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini dapat dijawab dengan menyelaraskan upaya membangun MIKTA dengan pencapaian kepentingan nasional. Melalui MIKTA, Indonesia mungkin dapat menggali manfaat yang lebih banyak daripada melalui jalur bilateral dalam bekerja sama dengan Korea, Turki, Australia, dan Meksiko,jika hal ini dapat dilakukan, kita dapat mewujudkan apa yang dituliskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama para Menteri Luar Negeri Meksiko, Korea, Turki, dan Australia: "21st Century Global Governance: Rise of the Rest.

Apalagi, total PDB gabungan ke lima negara ini sekitar delapan persen dari ekonomi dunia dan diharapkan akan terus berkembang. Dalam pertemuan khusus dengan para wartawan MIKTA, termasuk wartawan Liputan 6 SCTV, Raymond Kaya di Canberra, Julie Bishop (Kaya, 2015) menekankan keindahan dari MIKTA adalah hubungan antar negara anggotanya yang bersifat informal dan fleksibel. Pandangan Bishop ini bisa dipahami karena masing-masing negara memiliki masalah ekonomi dan politik internasional dengan negara-negara di

kawasannya. Soal Turki dengan Eropa, Meksiko dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Asean dan Korea Selatan dengan tetangganya RRT dan Jepang

Selain Mengikuti MIKTA Indonesia juga mengikuti forum kerjasama internasional lainnya seperti ASEAN,dan G20, . misalnya di ASEAN Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN yang merupakan forum/ organisasi kerjasama internasional regional Asia tenggara Indonesia sering dianggap sebagai pemimpin alami Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengingat dimensi geografis, populasi besar, posisi strategis dan sumber daya alam.

Negara ini telah merasa berhak atas posisi kepemimpinan dan secara umum diakui oleh anggota ASEAN lainnya sebagai yang pertama di antara yang sederajat Indonesia secara tradisional telah diterima sebagai kebijaksanaan konvensional, sedikit perhatian diberikan pada sejauh mana Indonesia sebenarnya berhasil menjalankan kepemimpinan di ASEAN dan bagaimana upaya untuk melakukannya telah dirasakan oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. (Emmers, 2014) di ASEAN indonesia melakukan kerjasama internasional yang meliputi banyak bidang mulai dari bidang security, ekonomi,politik , budaya dll kerja sama internasional yang dilakukan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dan Karena Indonesia terletak di kawasan strategis di ASEAN, indonesia dapat dan harus secara efektif terlibat di masa depan di dalam ASEAN

Indonesia telah memainkan peran kunci pada momen-momen penting dalam perkembangan ASEAN: pendiriannya pada tahun 1967 dan pengembangan perjanjian pendiriannya (1976); adopsi piagam pertama (2008).

Baru-Baru ini mengangguk pada norma-norma liberal seperti pembentukan badan hak asasi manusia regional (2009) dan deklarasi hak asasi manusia (2012). Pada KTT ke-30, Jokowi

berpendapat bahwa para pemimpin ASEAN "harus memiliki keberanian untuk melihat kekuatan dan kelemahan kami sehingga akan tetap menjadi organisasi yang relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia." Dia mendesak rekan-rekannya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kejahatan transnasional. (termasuk pembajakan, penangkapan ikan ilegal dan terorisme), untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, dan untuk memperkuat kerja sama ekonomi. di bawah Jokowi, Indonesia mendorong ASEAN untuk menjadi lebih efektif dan kooperatif. masalahnya adalah bahwa berbagai pejabat dan analis (baik di dalam maupun di luar Indonesia) menginginkan lebih dari ASEAN untuk beberapa waktu. (poole, 2017)

Sendangkan di G20 indonesia menjalankan politik luar negeri Indonesia telah merasa terhormat untuk menjadi anggota dari G20 yang didirikan pada tahun 1999. Indonesia merupakan satu-satunya negara perwakilan untuk Asia Tenggara, dan terpilih sebagai wakil didasarkan pada beberapa pertimbangan termasuk dida- lamnya ukuran populasi dan ekonomi. Indonesia telah terlibat dalam ekonomi yang lebih terintegrasi baik di tingkat regional seperti Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) atau internasional seperti di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Sejak masuknya Indonesia dalam G20, dukungan telah datang dari negara-negara tetangganya. Para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memberikan dukungan kepada Indonesia sebagai wakil dari Asia Tenggara. Mereka semua berharap bahwa keanggotaan bisa menyampaikan kepentingan umum dari negara-negara Asia Tenggara. Dengan kata lain, seperti yang dipromosikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di Thailand pada bulan Oktober 2009, ASEAN menetapkan posisi Indonesia sebagai mediator untuk G20 Peran ekonomi dan politik yang dimainkan oleh Indonesia sekarang bisa mengembangkan pemahaman tentang negara-negara maju dalam melihat dan memperlakukan negara-negara berkembang sebagai mitra

setara untuk kerjasama global dalam hal ini penulis mencoba untuk memaparkan secara deskriptif terkait alasan kepentingan Indonesia ingin bergabung dan memperluas pengaruh polugri di forum kerjasama Internasional MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia)

LANDASAN TEORITIS

Untuk menelisik lebih jauh alasan Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota di dalam forum kerjasama internasional Negara- Negara berkembang MIKTA (Meksiko,Indonesia ,Korea, Turki dan Australia).? Maka penulis akan menggunakan Teori Kerjasama Internasional dan Konsep Kepentingan Nasional untuk menjelaskanya.

Teori Kerjasama Internasional

Di dalam buku Politik Internasional suatu kerangka analisis K.J. Holsti mengemukakan Kerjasama Internasional bisa dijelaskan sebagai suatu proses semua usaha yang memungkinkan aktor internasional untuk mencapai tujuan bersama diantara actor yang terlibat seperti Negara melakukan pendekatan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ingin diselesaikan melalui kedekatan Negara satu dengan Negara yang lain rmelakukan pembahasan dan negosiasi,diskusi mengenai permasalahan yang ada, mencari fakta- fakta teknis (faktor-faktor) yang memberikan solusi permasalahan alternatif dan melakukan negosiasi untuk perjanjian yang dalam pembuatanya harus ada rasa saling pengertian antara dua actor yang terlibat” (KJ, 1998) MIKTA ialah bentuk Intergrasi sebuah forum kerjasama Multilateral Negara-Negara Berkembang yang dibuat untuk menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang ada di

dunia ini .Salah Satu bentuk Intergrasi nya ialah Pada 25 September 2013, di sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-67, para menteri luar negeri dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia bertemu untuk membahas pembentukan sebuah grup konsultatif informal yang kemudian disebut sebagai MIKTA.

Sejak saat itu, MIKTA dianggap sebagai kumpulan negara middle power yang memiliki agenda bagi kepentingan global.. Dideklarasikan pada September 2013, MIKTA (singkatan dari nama negara-negara anggotanya: Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia) diharapkan dapat memberikan ruang bagi penciptaan tata kelola global yang tidak hanya memperhatikan kepentingan negara-negara besar atau Adikuasa tersebut

Teori Politik Luar Negeri

Foreign Policy atau politik luar negeri merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mendapatkan suatu kepentingan tertentu. Berdasarkan pengertian umum, politik luar negeri (foreign policy) ialah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk menjaga, melindungi, dan membawa kepentingan nasional di dalam kancah pencatutan global .adapun cara untuk memahami konsep politik luar negeri ialah dengan cara membaginya menjadi dua bagian yaitu: politik dan luar negeri.

Dalam melakukan hubungan itu, setiap negara mempunyai Foreign Policy, sebagai seperangkat keputusan yang diambil dalam momen untuk meraih national interest suatu negara. Kondisi kondisi tertentu yang ada didalam negeri menjadi faktor terbentuknya kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk terlibat serta dalam MIKTA. Setidaknya ada tiga kepentingan nasional Indonesia yang dapat dicapai melalui keterlibatan Indonesia dalam MIKTA. Pertama, MIKTA dapat menjadi peluang bagi Indonesia menunjukkan konsistensi

identitas polugri bebas-aktif dan pembentuk norma (norms-setter) demokrasi. Kedua, Indonesia bisa menjalankan diplomasi untuk memperluas pengaruh polugri dalam agenda-agenda global yang akan dilaksanakan di 2015, khususnya negosiasi perubahan iklim COP 21 UNFCCC di Paris. Ketiga, MIKTA dapat memfasilitasi agenda hubungan bilateral atau multilateral antarnegara anggota di dalam MIKTA.

Bergabungnya Indonesia menjadi salah satu negara MIKTA merupakan perpanjangan kebutuhan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia . MIKTA sendiri dibentuk untuk tujuan ialah memperjuangkan kepentingan bersama untuk memperkuat multilateralisme, mendukung struktur pemerintahan global yang efektif, serta memberikan dukungan terhadap stabilitas dan kesejahteraan global

KEPENTINGAN INDONESIA BERGABUNG MENJADI SALAH SATU NEGARA ANGGOTA MIKTA

Seperti yang dijelaskan sebelumnya Indonesia bergabung dengan MIKTA pada tahun 2013 bersama Meksiko, Korea, Turki, Austria . Indonesia sendiri berharap untuk mengatasi tujuh prioritas MIKTA inti melalui inisiatif lintas sektoral dengan focus tertentu pada ekonomi dan perdagangan ekonomi kreatif, melaawan terorisme dan keamanan global, dan penjaga perdamaian. Indonesia percaya bahwa mencapai kemajuan ekonomi yang membantu mempertahankan perdamaian dan stabilitas yang lebih penting daripada sebelumnya. sejauh tujuh prioritas inti yang bersangkutan, indonesia memiliki sejumlah poin yang kuat untuk berbagi dengan negara-negara anggota MIKTA lainnya.

Indonesia Juga akan berupaya untuk menghubungkan secara strategis kepentingan politik dan ekonomi antara negara maju dan berkembang dalam MIKTA dan eksternal untuk membentuk dan mempertahankan pemerintahan global yang lebih adil.bergabungnya Indonesia menjadi salah satu Negara MIKTA merupakan perpanjangan Kebutuhan Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang ingin dicapai Indonesia . MIKTA sendiri dibentuk untuk tujuan ialah memperjuangkan kepentingan bersama untuk memperkuat multilateralisme, mendukung struktur pemerintahan global yang efektif, serta memberikan dukungan terhadap stabilitas dan kesejahteraan global .Dari kepentingan nasional suatu negara mampu menghasilkan berbagai kebijakan.Kebijakan yang dikeluarkan suatu negara, baik dalam negeri maupun luar negeri, umumnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/ideologi yang dipegang dan ingin dicapai oleh suatu negara. Kepentingan nasional menggerakkan aktor untuk melakukan suatu interaksi dengan aktor lainnya.

Memperluas pengaruh Kepemimpinan Politik luar negeri Indonesia dalam forum kerjasama Internasional dan agenda-agenda global.

Pertemuan awal MIKTA di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB Ke-67 bukan tanpa maksud. Sebaliknya, lokasi pertemuan yang dilakukan tersebut dimaksudkan bahwa kelima negara anggota MIKTA ingin mengirimkan sinyal bahwa MIKTA dapat memainkan peranan diplomasi aktif yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat global dalam PBB.

Hal ini juga berkaitan erat dengan negosiasi akhir perjanjian perubahan iklim dalam COP 21 UNFCCC di Paris akhir tahun ini, yang sekaligus menjadi titik strategis

bagi Indonesia untuk memperjuangkan agenda perubahan iklim di tingkat global. Momentum sinyal positif perundingan perubahan iklim dengan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara AS dan Tiongkok tahun lalu menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk merampungkan perundingan negosiasi perubahan iklim dengan mulus. Secara khusus, Indonesia dapat memainkan peran sentral sama halnya seperti ketika Indonesia berhasil menjadi jembatan penghubung antara negara-negara G-77 (negara berkembang) dan G-7 (negara maju) dalam COP 13 UNFCCC di Bali.

Kehadiran setiap negara dalam MIKTA tidak hanya mewakili entitas satu negara, tetapi lebih luas menjadi representasi kawasan setiap negara anggota MIKTA yang strategis. Arti strategis ini juga berkaitan erat bahwa negara-negara MIKTA memiliki perhatian yang sama dalam hal perubahan iklim. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi modal awal Indonesia memainkan diplomasi untuk mempersatukan suara-suara antara negara berkembang dan negara maju untuk menyukseskan perundingan perubahan iklim COP 21 UNFCCC. (Choiruzzad, 2016)

Lalu Kepemimpinan Indonesia di MIKTA yang lainnya yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperluas pengaruh politik luar negerinya antara lain Indonesia dan negara-negara anggota MIKTA lainnya dapat saling memperkuat satu sama lain untuk mendukung pembangunan ekonomi dan berpartisipasi dalam reformasi tata kelola global dengan berbagai cara. Pertama, Indonesia dapat berupaya meyakinkan negara-negara anggota MIKTA untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dari 2019 hingga 2020. Di tingkat global, Indonesia dapat menjadi penghubung strategis untuk kepentingan politik dan ekonomi antara negara maju

dan negara berkembang. untuk mempromosikan pemerintahan global yang lebih setara dan adil.

Di tingkat regional, kehadiran Indonesia dalam MIKTA dapat memperluas jaringan regional yang menghubungkan ASEAN dan negara-negara MIKTA lainnya, yang dapat berkontribusi pada arsitektur regional yang berkembang di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia (wilayah Indo-Pasifik). Situasi ini memperkuat hubungan antar-kawasan antara ASEAN dan kawasan di mana negara-negara MIKTA lainnya misalnya yang berada di Mediterania, Amerika, dan Oseania). Kerja sama tersebut dapat mendukung integrasi regional ASEAN. (SEKETARIS NASIONAL ASEAN - INDONESIA, 2016)

Kedua, Indonesia dapat mengejar diplomasi ekonominya di dalam MIKTA. Indonesia dapat memperkuat kemitraan ekonomi bilateral dengan Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia melalui peningkatan perdagangan dan barang dan ekonomi kreatif. Indonesia dapat memanfaatkan peluang di negara-negara MIKTA dan mempromosikan produk-produknya ke daerah lain di mana negara-negara anggota MIKTA berada. Ketiga, Indonesia akan mendorong keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam MIKTA dan dapat berupaya meningkatkan hubungan timbal balik di antara para aktor non-negara di negara-negara MIKTA. Pada 2015, MIKTA menyelenggarakan Konferensi Jaringan Akademik MIKTA dan Kamp Profesional Muda MIKTA di Seoul, Korea Selatan. Indonesia dapat memasukkan komunitas bisnis dan organisasi non-pemerintah dari negara-negara anggota MIKTA ke dalam pertemuan tahunan MIKTA untuk meningkatkan partisipasi publik dan kepemilikan publik dalam kemitraan antara negara-negara anggota MIKTA

Keempat, MIKTA dapat membantu mendukung tujuan Indonesia menjadi tumpuan maritim dunia. Indonesia dapat mengundang investor Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur dan dukungan logistik di Indonesia. (Pakpahan, 2018) ,dalam jaringan MIKTA. Jelas bisa kita katakan, Indonesia adalah kekuatan “untuk perubahan”. Dikelilingi oleh negara adidaya regional atau global itu mencari cara untuk membangun berdiri sendiri yang melampaui gagasan tentang 'kekuatan tengah'. Bahkan, Indonesia membayangkan dirinya sebagai pemain utama dalam urusan internasional. MIKTA dengan visi menyatakan amandemen lembaga dan organisasi global, menyediakan Indonesia dengan platform yang berguna dan praktis untuk menyuarakan ide-ide, keprihatinan dan proyek-proyek dalam hal ini.Indonesia mengawali keketuaannya pada forum kerja sama Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) untuk periode 2018 dengan menyelenggarakan Senior Officials’ Meeting (SOM) MIKTA ke-4 di Yogyakarta, pada 24-25 Januari 2018. Indonesia memegang kepemimpinan yang MIKTA ini mengambil tema: "Pembinaan Ekonomi Kreatif dan Berkontribusi untuk Global Peace," yang mencakup berikut, topik utama: pengembangan ekonomi kreatif dan inovasi untuk mempertahankan perdamaian global, termasuk kontra-terorisme, keamanan cyber, dan masalah migrasi. Indonesia memiliki potensi, membangun nya warisan Bandung dan kebijakan non-konfrontasi, untuk andal mempromosikan dan memperluas tujuan MIKTA baik antar peserta dan nonanggota negara berkembang.

Selain itu, tema ini juga sejalan dengan berbagai kontribusi Indonesia terhadap upaya perdamaian global, di mana Indonesia saat ini mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 MIKTA SOM dibuka dan

dipimpin oleh Direktur Jenderal Multilateral, Febrian A. Ruddyard, seperti Indonesia Resmi Senior di MIKTA, dan dihadiri oleh delegasi dari Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki dan Australia (Kusumawardhani, 2018)

Peran MIKTA dalam menanggapi berbagai isu regional dan global, dan persiapan untuk Pertemuan MIKTA Menteri Luar Negeri. Sejumlah isu global baru-baru dibahas pada pertemuan tersebut, termasuk masalah Palestina, pembangunan berkelanjutan, reformasi PBB, dan Korea Utara. "Sebagai kelompok kekuatan menengah, MIKTA sangat relevan dengan dinamika multipolar dan memiliki potensi untuk memperkuat tatanan global", Menurut Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Febrian A. Ruddyard, yang juga merupakan Senior Official Leader Indonesia untuk MIKTA menyatakan Sejak Indonesia menjadi ketua MIKTA Indonesia juga mengambil inisiatif untuk mengadakan beberapa program penjangkauan seperti *MIKTA Goes to Campus* dan *MIKTA Fun Walk and Charity Bazaar*. Dalam waktu dekat, Indonesia akan menggelar *MIKTA Goes to Campus* di Universitas Indonesia pada tanggal 8 Februari 2018 dan Konsultasi Perencanaan Kebijakan MIKTA di Surabaya pada 21 Februari 2018. (Kementerian Luar negeri Republik Indonesia, 2017)

Selain memperluas pengaruhnya didalam MIKTA Indonesia juga memperluas dan menunjukkan pengaruh politik luar negeri dalam agenda – agenda global lainnya seperti, Misalnya, memperjuangkan peran Indonesia dalam kelompok multilateral, seperti KTT Asia Timur (EAS), G20, PBB atau Organisasi Islam Kerjasama (OKI), terlihat jelas sebagai keberhasilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menekankan kredensial Islam dan demokrasi Indonesia. Dengan menunjukkan minat dalam hal-hal tentang dunia Muslim - misalnya proses perdamaian Israel-Palestina atau Rohingya Situasi Muslim di

Myanmar - Yudhoyono berhasil mengungkapkan solidaritas di Indonesia dengan negara-negara Muslim. Terlepas dari pengaruh terbatas negara dalam hal ini, Yudhoyono juga mulai disebut Bali Democracy Forum yang (BDF), yang merupakan inisiatif pemerintah yang didirikan pada tahun 2008 - yang memungkinkan Indonesia untuk berbagi pengalaman dari demokratisasi dengan negara-negara Muslim lainnya dan sebaliknya. Terlepas dari kenyataan bahwa BDF kekurangan dari badan pembuat keputusan yang tepat, dan telah dikritik sebagai toko bicara lain, ini inisiatif membuktikan keinginan Indonesia untuk menjadi pemain yang lebih menonjol dalam urusan dunia. (Ricklefs, 1993)

KESIMPULAN

Penelitian Bertujuan Untuk menjelaskan alasan Indonesia bergabung menjadi salah satu anggota di dalam forum kerjasama internasional Negara berkembang MIKTA (Meksiko,Indonesia ,Korea,Turki dan Australia),sejak berdirinya MIKTA pada tahun 2013 sampai sekarang, Negara – Negara MIKTA sudah pernah semua menjabat sebagai ketua MIKTA mulai dari Meksiko pada tahun 2013 sampai Indonesia menjadi Ketua MIKTA periode 2018/2019, selama menjabat sebagai ketua MIKTA , Negara - Negara MIKTA banyak membuat program –program sesuai dengan tema yang menjadi focus dalam periode kepemimpinan mereka di MIKTA

Lalu di dalam MIKTA sering di adakan pertemuan untuk membahas kinerja MIKTA dan masalah- masalah internasional dan didalam MIKTA juga ada Senior Official Meeting (SOM) kegiatan yang dilakukan oleh Penjabat Senior MIKTA untuk membahas program program yang dilakukan MIKTA dan membahas masalah Internasional secara lebih mendalam .Kemudian

berdasarkan fakta yang penulis pahami dari skripsi ini., kepentingan Indonesia bergabung menjadi salah satu negara anggota MIKTA yang didasarkan adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh Indonesia yaitu :

1. Indonesia bisa menjalankan diplomasi untuk memperluas pengaruh polugri dalam agenda-agenda global

Kemudian, kepemimpinan Indonesia di MIKTA yang lainnya yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperluas pengaruh politik luar negerinya antara lain Indonesia dan negara-negara anggota MIKTA lainnya dapat saling memperkuat satu sama lain untuk mendukung pembangunan ekonomi dan berpartisipasi dalam reformasi tata kelola global dengan berbagai cara. Pertama, Indonesia dapat berupaya meyakinkan negara-negara anggota MIKTA untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dari 2019 hingga 2020. di tingkat global, Indonesia dapat menjadi penghubung strategis untuk kepentingan politik dan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. untuk mempromosikan pemerintahan global yang lebih setara dan adil.

Sendangkan di tingkat regional, kehadiran Indonesia dalam MIKTA dapat memperluas jaringan regional yang menghubungkan ASEAN dan negara-negara MIKTA lainnya, yang dapat berkontribusi pada arsitektur regional yang berkembang di kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia (wilayah Indo-Pasifik). Situasi ini memperkuat hubungan antar-kawasan antara ASEAN dan kawasan di mana negara-negara MIKTA lainnya misalnya yang berada di Mediterania, Amerika, dan Oseania). Kerja sama tersebut dapat mendukung integrasi regional ASEAN. (SEKETARIS NASIONAL ASEAN -INDONESIA, 2016)

Kedua, Indonesia dapat mengejar diplomasi ekonominya di dalam MIKTA. Indonesia dapat memperkuat kemitraan ekonomi bilateral dengan Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia melalui peningkatan perdagangan dan barang dan ekonomi kreatif. Indonesia dapat memanfaatkan peluang di negara-negara MIKTA dan mempromosikan produk-produknya ke daerah lain di mana negara-negara anggota MIKTA berada.

Ketiga, Indonesia akan mendorong keterlibatan aktor-aktor non-negara dalam MIKTA dan dapat berupaya meningkatkan hubungan timbal balik di antara para aktor non-negara di negara-negara MIKTA. Pada 2015, MIKTA menyelenggarakan Konferensi Jaringan Akademik MIKTA dan Kamp Profesional Muda MIKTA di Seoul, Korea Selatan. Indonesia dapat memasukkan komunitas bisnis dan organisasi non-pemerintah dari negara-negara anggota MIKTA ke dalam pertemuan tahunan MIKTA untuk meningkatkan partisipasi publik dan kepemilikan publik dalam kemitraan antara negara-negara anggota MIKTA

Keempat, MIKTA dapat membantu mendukung tujuan Indonesia menjadi tumpuan maritim dunia. Indonesia dapat mengundang investor Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia untuk berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur dan dukungan logistik di Indonesia. dan potensi kerjasama MIKTA masa depan diantaranya Potensi Ekonomi karena Sebagai grup dialog informal, MIKTA dapat dikatakan mempunyai nilai strategis yang patut dipertimbangkan dalam formulasi polugri. MIKTA mewakili 8 persen total PDB dunia dengan potensi ekonomi 5,9 triliun dollar AS dan 7 persen total populasi dunia atau lebih dari 500 juta penduduk dunia

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

KJ, H. (1998). *Politik Internasional kerangka untuk analisis*. Jakarta: Erlangga.

Kusumawardhani, A. (2018). *Mahasiswa Indonesia Sambut MIKTA Goes to Campus di UI*. Jakarta: Kabar24.

Pakpahan, B. (2018). *Can Indonesia Help MIKTA Thrive*. New York: The Diplomat.

Plano, J. &. (1999). *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra A bardin.

Ricklefs. (1993). *Sejarah Modern Indonesia*. USA: University Press.

Warsito, T. (1998). *Teori - Teori Politik Luar Negeri*. Yogyakarta: Bigraf.

JURNAL

Fenyő Márton, D. (2015). The Foreign Policy of Indonesia In Light of Presiden Jokowi visi misi Program. *Semantic Scholar*, 1-60.

Rauf, F. (2018). *Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia Bahas Kerjasama Antarnegara di Unhas*. Makassar: Dj journalist.

WEBSITE

Kementerian Luar negeri Republik Indonesia. (2017, desember 15). *Kemenlu RI*. Retrieved January 8, 2019, from Kemenlu RI: <https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Resmi-Menjadi-Koordinator-MIKTA-untuk-Tahun-2018>.

Saputra, L. (2013, desember 19). *Luqman Saputra*. Retrieved oktober 2, 2018, from Kepentingan Nasional dalam Interaksi Antar negara : <http://luqman-saputra.fisip.13.Unair.ac.id>

SEKRETARIS NASIONAL ASEAN -INDONESIA. (2016, February 23). *SETNAS*. Retrieved January 26, 2019, from SETNAS: <http://setnas-asean.id/en/kerja-sama-eksternal>

BERITA

Choiruzzad, S. A. (2016). *G-20, MIKTA, dan Indonesia*. Jakarta: sindo news.

Kaya, R. (2015). *MIKTA dan Hubungan Indonesia – Australia*. Jakarta: Liputan 6.

M, R. (2018). *Indonesia Fokuskan Kerjasama Ekonomi Kreatif untuk MIKTA*. Jakarta: RRI.co.id.

Pars today. (2016). *G-20, MIKTA, dan Indonesia*. Jakarta: Pars Today.

